

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI NOMOR: 05-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Rezky Darmawan Aribowo
NPM. 0771010058

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI NOMOR: 05-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

Rezky Darmawan Aribowo
NPM. 0771010058

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI NOMOR: 05-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

Oleh:

REZKY DARMAWAN ARIBOWO
NPM. 0771010058

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur

Pada Tanggal 22 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji:

1.

Mas Anienda Tien Fitriyah, SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Subani, SH.,M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 1991103 1 001

4.

Mas Anienda Tien Fitriyah, SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 1991103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

Disusun oleh :

REZKY DARMAWAN ARIBOWO
NPM : 0771010058

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Mengetahui,
DEKAN

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,M.M
NIP. 19620625 1991103 1 001

Mas Anienda Tien Fitriyah, SH.,M.H
NPT. 3 7709 07 0223

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI NOMOR: 05-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

Oleh:

REZKY DARMAWAN ARIBOWO
NPM. 0771010058

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur
Pada Tanggal 22 Juni 2012

Tim Penguji:

1. Sutrisno, SH.,M.Hum : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Subani, SH.,M.Si : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001
3. Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM : (.....)
NIP. 19620625 1991103 1 001
4. Mas Anienda Tien Fitriyah, SH.,MH : (.....)
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP. 19620625 1991103 1 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, sebagai pemberi hidup dan penguasa kehidupan yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Ec. Gendut Sukamo,MS selaku Wadek II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Subani, SH, M.Si selaku Kaprogdi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
5. Ibu Mas Anienda Tien F, SH, MH selaku dosen pembimbing yang selalu

memberi dukungan dan selalu meluruskan kesalahan-kesalahan penulis

6. Bapak Kolonel (Chk) Hariyadi Eko Purnomo, SH selaku Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya beserta jajaran pejabat dan staf Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sudah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, memberikan informasi dan memberi suasana yang kekeluargaan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
7. Bapak Mayor Sus Tri Ahmad Bhaykonni, SH selaku anggota Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sudah meluangkan waktu, pikiran dan kemurahan hatinya untuk membimbing dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis hingga skripsi ini selesai
6. Bapak dan Ibu dosen Bapak Eko Wahyudi, SH,.MH, Ibu Yana indawati, SH.M.Kn
7. Kabag Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang tidak pernah lelah membantu penulis dalam kelancaran administrasi, memberikan suasana santai dan suasana kekeluargaan dengan mahasiswa/i
8. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai sampai mati, Bapak Gatot Soenyoto, SH,.M.Hum dan Mama Mariani, yang tak pernah lelah memberikan doa dukungan, inspirasi dan sebuah kebanggaan akan didikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kakak Andre Setiawan Aribowo, SP dan juga adik saya yang paling saya sayangi, Rico “Fight Four Fun” Juliawan Aribowo yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, doa, harapan dan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tersebut
9. Saudara-saudara tercinta, keluarga besar Sarwono “Fatmily” dari Sabang

hingga Merauke, FIGHT FOUR FUN Family (Ardana “Ateng” Febri A, Rahdian “Taocho” Dwi N, Timotius “Ahong” Alvian Y, Gilang “Suleh” Anditya P, Cidho “Anak Tunggal” Arya P, Martinus “Donkey” Anggityo, Catur “Punk” Wicaksono, Jessisca Dewi “Tattoo” Febriane) yang selalu memberi doa dan ada disetiap langkah penulis, Miftahunnajah “Asuwah” Rio Agusta (c) SH (teman sehidup tak semati) beserta kekasihnya Detanti “Detbeb” Pramesti, SH dan Dinda Nistria yang selalu menyediakan waktunya untuk penulis dan menjadi ‘saudara’ terbaik dalam hidup, Bu Nar yang selalu setia membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini serta Cici yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi hingga pagi buta dan Jacky yang selalu memberi kicauan indahnnya

10.Sahabat-sahabat tak terlupakan, Anggoro Dwi S, Afirul Nur R, Bambang Eko, R.David, Bonaventura Gerry, Karina Putri Gartina SH, Hari Cahyadi, Dimas Nuruddin Mufti SH, Rizka Alifiawiramihardja (SE), Rizal Rangga (S.Kom), Adinda Basuki, Mas “Ndeng”, Dimas Rahmat P.,SH, Ardan Udika, Josua MS.,SH, Dedy Armanto, Agung Dwi, M.Arief Rizky, Vicky Gusti (S.Sos), Hamdan Rosyid (S.Sos), Zendy W SH, Hilda Relda (S.Kom), Sharon Nanlohy, Rae C (S.Sos) dan semuanya sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu penulis meminta maaf jika didalam skripsi ini terdapat salah penulisan baik kata, nama, dan lain lain. Maka dari itu saran dan kritik sangatlah penulis harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan

penyempurnaan penelitian selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rezky Darmawan Aribowo
NPM : 0771010058
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 10 Mei 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2011)” bertujuan pertama untuk mengetahui proses penyelesaian bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan; dan kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam proses peradilan militer, penanganan sebuah perkara yang dilakukan oleh anggota militer bergantung pada tindakan perkara yang dilakukanya dan tidak sama dengan proses penanganan di peradilan umum, seperti yang tertera pada Undang-undang no 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang dimana didalam undang-undang tersebut telah diatur segala hal yang berhubungan dengan peradilan militer. Kedua, bahwasanya dalam pengambilan sebuah putusan, Majelis Hakim Pengadilan Militer juga perlu menimbang dan menjunjung tinggi rasa keadilan yang tertuang dalam fakta-fakta hukum dan juga aspek-aspek kemiliteran karena terdakwaanya merupakan subjek hukum militer.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Militer

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kajian Pustaka	5
1.5.1. Pengertian Militer	5
1.5.2. Subjek Hukum Militer	9
1.5.3. Hukum Pidana Militer	10
1.5.4. Pengertian Peradilan Militer	16
1.5.4.1. Pengadilan Militer	16
1.5.4.2. Pengadilan Militer Tinggi.....	17

1.5.4.3. Pengadilan Militer Utama.....	18
1.5.4.4. Pengadilan Militer Pertempuran	19
1.5.5. Justisiabel Peradilan Militer.....	20
1.5.6. Hukum Acara Pidana Militer	21
1.5.6.1. Penyidikan	24
1.5.6.2. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera)	26
1.5.6.3. Kedudukan Hakim dan Panitera Peradilan Militer	26
1.5.6.4. Peran dan Susunan Oditurat.....	28
1.5.7. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
1.5.8. Pengertian Pembunuhan	30
1.6. Metode Penelitian	33
1.6.1. Jenis Penelitian.....	33
1.6.2. Sumber Data.....	33
1.6.2.1. Bahan Hukum Primer.....	34
1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	34
1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier	35
1.6.3. Pengumpulan Bahan atau Data	35
1.6.4. Metode Analisis Data	36
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II PROSES PENYELESAIAN BAGI ANGGOTA MILITER	
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN...	38
2.1. Kasus Posisi.....	38

2.2. Proses Penyelesaian Terhadap Kasus.....	41
2.2.1. Penyidikan	41
2.2.2. Penyerahan Perkara	44
2.2.3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	47
2.2.4. Upaya Hukum	51
2.2.4.1. Pemeriksaan Tingkat Banding.....	51
 BAB III PENERAPAN SANKSI BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010 dan Putusan Nomor: 05-K/PMT.III/BDG/AD/2011).....	53
3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Tingkat Pertama.....	53
3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Tingkat Banding	54
3.3. Analisa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding	59
 BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	65
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum Nasional harus sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, dari satu sisi, hukum harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial atau kemakmuran, yang artinya secara simultan hukum menumbuhkan ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dari sisi lain hukumpun harus mampu menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan dan yang berketuhanan yang maha esa.

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu

dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya¹.

Banyaknya kasus Pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer

¹ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum.

Maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer.

Sejauh ini, penegakan hukum terhadap seorang anggota militer dirasa masih belum maksimal karena banyak yang menilai bahwa kesolidan yang terdapat di jiwa korsa (korps kesatuan) anggota militer masih melekat erat pada jati diri seorang militer. Dan hal ini sangat mempengaruhi hasil persidangan apabila seorang anggota militer melakukan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer. Jadi, stigma itu melekat pada sebagian masyarakat umum akan tegaknya hukum militer di Indonesia.

Beberapa kasus yang sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AL yang berpangkat kolonel. Ketika itu, ia membunuh istri dan hakim pengadilan agama pada saat sesaat setelah selesainya persidangan perceraian antara anggota militer tersebut dengan istrinya.

Setelah melalui beberapa persidangan yang dilakukan di pengadilan militer tinggi, maka pada akhirnya hakim menjatuhkan terdakwa tersebut dengan hukuman seumur hidup karena dirasa terdakwa adalah seorang anggota militer dan di dakwa juga tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan tindak pembunuhan berencana.

Jadi, sebagaimana pemberitaan yang ada, anggota militer tersebut akan menjalani harinya dibalik jeruji besi sampai dengan eksekusi putusan tersebut kepadanya.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penyelesaian bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimana penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI dan dapat menjadi bahan kajian atau menjadi gambaran bagaimana penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi kepustakaan universitas maupun pengadilan militer itu sendiri.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam perundang-undangan kita dibedakan menjadi dua macam militer, yaitu: militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sebagai sukarelawan lainnya.

- a. Militer Sukarela (Milsuk)
Seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.
- b. Militer Wajib (Milwa) dan militer wajib darurat
Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh komandan kesatuan.
- c. Sukarelawan lainnya
Persyaratan analog dengan tersebut 13 b, perbedaannya ialah bahwa tersebut 13b diwajibkan oleh pemerintah agar supaya ia memasuki

dinas militer, sedangkan tersebut 13c ini dalam keadaan perang, adalah atas kesadaran sendiri baik karena ada anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik. Sedangkan mengenai kesukarelaannya ada persamaannya dengan tersebut 13a namun ia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu tertentu.

- d. Militer Sukarela dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan.

Menurut pasal 15 sampai dengan 22 jo. Ps.25 Perppm no 37 Th. 1959 LN. No. 59 Th. 1959, (Peraturan tentang kepangkatan dalam jabatan Militer Sukarela), terhadap seseorang militer sukarela dalam keadaan:

- 1) Dikarenakan larangan melakukan jabatan (untuk kepentingan dinas dan/atau disiplin),
- 2) Pemberhentian sementara (karena melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan angkatan perang, ia berada dalam penahanan justisial, ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan) atau;
- 3) Pernyataan non aktif dari jabatan (menerima pencalonan untuk anggota DPR/MPR/Konstituante, mendapat tugas belajar, akan dikembalikan ke masyarakat/masa persiapan pensiun), masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratif Angkatan Perang dan baginya tetap berlaku hukum pidana dan disiplin militer dan ia tetap dalam yuridiksi peradilan militer².

Walaupun sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum

² S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010, hal 22

Pidana Tentara/ Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947):

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

1. Ke.1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Ke.2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47: Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer,, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

1. Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
2. Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.

3. Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
4. Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Di dalam pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.

1.5.2 Subjek Hukum Militer

Hukum Militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Militer, yakni orang yang menurut peraturan yang berlaku merupakan Prajurit TNI
 - 1) Prajurit Sukarela, yaitu Warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan atas kesediaan sendiri
 - 2) Prajurit Wajib yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasar Undang-Undang
 - 3) Mereka yang memakai uniform atau pakaian seragam militer dimuka umum terkecuali bila kemudian ternyata mereka bukan militer
- b. Orang yang dipersamakan statusnya dengan militer, yakni:
 - 1) Para mantan anggota militer pada saat mereka mengenakan pakaian seragam militer atau yang dipergunakan untuk suatu dinas militer
 - 2) Orang-orang yang diberi pangkat militer tituler, orang yang dimiliterisir dan anggota dari organisasi atau badan yang dimiliterisir
 - 3) Militer asing yang mengikuti pasukan militer atau operasi militer atas ijin yang berwenang atau yang menjadi tawanan perang.
- c. Didalam keadaan bahaya atau darurat dan sewaktu perang, Hukum Militer berlaku juga terhadap orang-orang sebagai berikut:
 - 1) Penduduk Wilayah Indonesia:
 - a) Yang berada disuatu daerah dimana dinyatakan berlakunya Hukum Militer
 - b) Yang mengadakan usaha-usaha yang sangat merugikan keamanan Negara.
 - 2) Penduduk wilayah asing:
 - a) Yang sewaktu pertempuran melakukan kegiatan yang sangat merugikan kepentingan/keamanan pasukan Indonesia yang menduduki wilayah tersebut
 - b) Yang wilayahnya diduduki oleh pasukan Indonesia dan dinyatakan bahwa Hukum Militer berlaku bagi daerah bersangkutan
 - 3) Penduduk (Indonesia maupun negara lain):
 - a) Yang secara spontan dan serentak bangkit memanggul senjata untuk mengusir suatu agresor, yang oleh Hukum Perang dinamakan *Levee en Masse* harus memenuhi 2 syarat yaitu:

- (1) Mempergunakan senjata secara terang-terangan
- (2) Mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Perang
- b) Tergabung dalam pasukan-pasukan sukarelawan yang dibentuk untuk melawan suatu agressor. Pasukan-pasukan ini harus memenuhi 4 syarat:
 - (1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab untuk para bawahannya
 - (2) Para anggotanya mempergunakan suatu tanda pengenal tetap dan yang dapat jelas dikenal dari suatu jarak tertentu
 - (3) Mempergunakan senjata secara terang-terangan
 - (4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dari Hukum Perang³

1.5.3. Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.⁴

a. Tindak Pidana Militer/Khusus

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer, yang terdiri dari:

- (1) Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict):

³ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hal 37

⁴ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 26

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus untuk militer⁵

Contoh:

- a. Tindak Pidana Disersi yang tertera pada pasal 87 KUHPM
- b. Tindak pidana insubordinasi pada pasal 105-109 KUHPM
- c. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan pasal 118 KUHPM.

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militerire Delict)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer⁶

Jadi, walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang anggota militer yang

⁵ Ibid, hal 27

⁶ Ibid, hal 29

memang terjat dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

b. Hukum Disiplin Militer

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamala, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.

- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit militer Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa⁷

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu ditransformasikan menjadi tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mengakkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) daripada sikap mental (mental houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab, yang datang

⁷ Ibid, hal 22

dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus perwira, bintara atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi.

Didalam kehidupan ketentaraan / militer adalah syarat mutlak:

- a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi
- b. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.⁸
- c. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang anggota militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kemabli di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer⁹.

⁸ Ibid, hal 23

⁹ Ibid, hal 28

Jadi walaupun didalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.

d. Hakekat Pidana Bagi Militer

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya, yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁰.

¹⁰ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010, hal 69

1.5.4 Pengertian Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1997, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh :

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

1.5.4.1. Pengadilan Militer

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 31 tahun 1997 pasal 40 tentang peradilan militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer yaitu:

Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah
- b. Mereka yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa termasuk dalam tingkat kepangkatan kapten ke bawah
- c. Mereka berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer

Jadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang di pasal tersebut maka jika seorang tersangka tersebut adalah prajurit militer yang berpangkat kapten ke bawah, maka mereka akan disidangkan

di pengadilan militer. Dan hakim ketua yang memiliki wewenang di pengadilan militer tersebut adalah hakim yang memiliki pangkat paling rendah Mayor dan hakim anggota atau oditur militer paling rendah berpangkat Kapten.

1.5.4.2 Pengadilan Militer Tinggi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 31 tahun 1997 pasal 41 tentang peradilan militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer yaitu:

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - a. Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas
 - b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas
 - c. Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi
2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding
3. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Jadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang tertera pada pasal 41, jika seorang tersangkanya adalah prajurit militer yang berpangkat Mayor keatas maka prajurit tersebut akan disidangkan di pengadilan militer tinggi. Dan selaku Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi tersebut adalah hakim yang memiliki pangkat paling rendah Kolonel,

sedangkan untuk Hakim anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

Jika seorang terdakwa adalah seorang Kolonel maka tingkat kepangkatan seorang Hakim Ketua, Hakim anggota maupun Oditur Militer Tingginya juga harus paling rendah berpangkat setingkat dengan seorang terdakwa yang berpangkat Kolonel tersebut.

1.5.4.3. Pengadilan Militer Utama

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 5 tahun 1997 pasal 42, 43 dan 44 tentang kekuasaan peradilan militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer utama yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 42 yang menyebutkan:
Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
2. Sesuai dengan pasal 43 yang menyebutkan:
 - 1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan
 - b. Antar Pengadilan Militer Tinggi
 - c. Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer
 - 2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - a. Apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama
 - b. Apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara yang sama
 - 1) Pengadilan Militer Utama memutus perberbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan

dalam lingkungan peradilan militer atau lingkungan peradilan umum.

3. Sesuai dengan pasal 44 yang menyebutkan:

- 1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing
 - b. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya
- 2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran
- 3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
- 5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

1.5.4.4. Pengadilan Militer Pertempuran

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun

1997 Pasal 45 dan 46 Tentang kekuasaan peradilan militer, bahwa

kekuasaan pengadilan militer pertempuran yaitu:

1. Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997:
Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
2. Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997:
Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah pertempuran

1.5.5. Justisiabel Peradilan Militer

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus. Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang kecuali berlaku khusus.

Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang diatur khusus dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hal ini terlihat jika kita menyimak pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: “pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukuman yang dirasakan terlalu ringan jika hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh anggota militer di dalam kesatrian-kesatrian atau asrama-asrama militer, disamping itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer saja, tidak

berlaku bagi umum, desersi, menolak perintah atasan/dinas insubordinasi dan sebagainya.

Jika soal-soal tersebut dimasukkan kedalam KUHP akan membuat KUHP kurang adil dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak mengadilinya juga tersendiri yaitu peradilan militer.¹¹

Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seorang militer merupakan subjek tindak pidana yang berlaku untuk umum dan subjek tindak pidana militer.

1.5.6. Hukum Acara Pidana Militer

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer, bahwa Polisi Militer atau lebih dikenal dengan lembaga POM merupakan suatu kepolisian khusus di bidang militer yang merupakan penyidik bagi setiap prajurit yang melanggar ketentuan hukum pidana umum di dalam hukum militer dan sebagai badan yang melaksanakan fungsi kepolisian di lingkungan TNI.

Setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak pelapor, maka sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka segera

¹¹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 29

dilakukannya proses penangkapan. Penangkapan tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan pada surat perintah, kecuali dalam hal tertangkap tangan yang diatur tersendiri dengan ketentuan pasal 77 ayat (2), dimana penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan tersangka beserta barang buktinya segera dilaporkan atau diserahkan kepada penyidik dan oleh penyidik segera dilaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) tersangka.

Pasal 78 ayat (1) menjelaskan setelah diberitahukan adanya penangkapan terhadap anggotanya, maka Ankum berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Penahanan terhadap tersangka paling lama 20 hari, selanjutnya didalam ayat (2) disebutkan Papera (Perwira Penyerah Perkara) berwenang memperpanjang penahanan dimaksud untuk setiap kali perpanjangan selama 30 hari, sampai dengan paling lama 180 hari.

Penahanan yang dilakukan tersebut untuk keperluan penyidikan dan adanya alasan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dapat merusak atau menghilangkan barang bukti atau bahkan mengulangi perbuatannya atau membuat keonaran serta terhadap perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Polisi Militer selaku penyidik pada dasarnya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan dan setelah penahanan dilakukan oleh Ankum tersangka, maka penyidik melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan berita acara, menyerahkan berkas dan berita acara hasil penyidikan kepada Papera, Ankum dan Oditur selaku penuntut umum. Penyerahan berkas dan berita acara hasil penyidikan tersebut

disertai dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada oditur.

Setelah itu masuklah ke dalam tahapan penuntutan yang dilakukan oleh oditur. Oditur menerima berkas dan berita acara hasil penyidikan serta tanggung jawab tersangka dan barang bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 124 ayat (1), oditur segera memeriksa dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika memang penyidikan tersebut dirasa kurang lengkap, maka oditur mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk untuk diperbaiki atau dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari oditur. Jika telah lengkap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 UU No 31/1997 Tentang Peradilan Militer, oditur segera membuat pendapat hukum kepada Papera yang antara lain dapat berisi permintaan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan dan jika memang telah disetujui oleh Papera, maka oditur segera menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) atau saran untuk menutup perkara demi hukum yang jika disetujui oleh Papera akan diterbitkan Surat Keputusan Penutupan Perkara atau Skeptupra. Setelah apabila Papera telah menerbitkan Skeppera, maka oditur segera menyiapkan surat dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Militer/Tinggi perkara tersebut untuk segera disidangkan, sedang oditur tidak berwenang menyerahkan perkara ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Papera yang ditandai dengan terbitnya Skeppera.

Jika sudah memasuki ke dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, setelah Ketua Pengadilan Militer/Tinggi menerima penyerahan perkara dari oditur, maka Ketua Pengadilan Militer/Tinggi segera mempelajari apakah perkara tersebut termasuk kewenangannya atau bukan. Jika memang termasuk dalam kewenangannya maka segeralah ditunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.

Lebih lanjut berdasar pada ketentuan yang diatur pada pasal 136 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, seorang Ketua Majelis Hakim segera menentukan hari persidangan dan memerintahkan oditur untuk memanggil terdakwa dan para saksi. Oditur segera mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi menurut hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan dan dalam perkara apa mereka dipanggil. Tahapan persidangan selanjutnya dimulai dari pembacaan surat dakwaan oleh oditur sampai dengan penuntutan, pembelaan hingga pembacaan putusan sampai dengan eksekusi.

1.5.6.1. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu proses terpenting dalam suatu penyelesaian suatu perkara pidana. Karena pada proses penyidikan inilah, tindakan penyidik di tekankan pada tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana (Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 1997) serta untuk mengumpulkan barang bukti sehingga tindak pidana yang terjadi dapat menjadi terang dan dapat menemukan pelakunya/tersangka (pasal 1 angka 16 UU Nomor 31 Tahun 1997)

).Sehingga dari proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana (tersangka) atau bukan.

Proses ini memang sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana tentang tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana diatur sebagai proses dalam penyelidikan (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981), sedangkan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan pelakunya diatur sebagai proses penyidikan (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981). Jadi dalam KUHAP yang mengatur hukum acara pidana umum terdapat proses penyelidikan dan proses penyidikan, sementara dalam hukum acara pidana militer proses tersebut dijadikan satu menjadi proses penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 69 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwasanya penyidik dan penyidik pembantu, ialah:

1. Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)
2. Polisi Militer
3. Oditur

Sedangkan penyidik pembantu, ialah:

1. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
2. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

1.5.6.2. Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan PAPERA

Ditinjau dari peran dan fungsinya, seorang Komandan adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.

Sedang peran dan fungsi seorang Perwira Penyerah Perkara, ialah Komandan setingkat Komandan Korem yang oleh undang undang diberi wewenang (dalam pelanggaran hukum kasus tindak pidana) menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran dan pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer tersebut disampaikan kepada Papera berdasarkan pada berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

1.5.6.3. Kedudukan Hakim dan Panitera Peradilan Militer

Sesuai dengan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwasanya tugas dan fungsi seorang Hakim dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, sesuai dengan tingkat peradilanannya.

Mengacu pada ketentuan pasal 16 UU No 31 Tahun 1997, yaitu:

- a. Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten
- b. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel
- c. Hakim Ketua dalam Persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel
- d. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (c) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadilinya.
- e. Dalam hal terdakwa berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwa perwira tinggi Hakim ketua, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa

f. Kepangkatan panitera dalam persidangan:

- 1) Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten
- 2) Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor
- 3) Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling Tinggi berpangkat Kolonel.

Hakim-hakim militer tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Panglima TNI berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Lain halnya dengan Panitera persidangan, Panitera tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Panglima TNI

1.5.6.4. Peran dan Susunan Oditurat

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk

bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang Undang Peradilan Militer.

Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republi Indonesia yang selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

1.5.7. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Moeljanto:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹²

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku

¹² Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal 63

2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana¹³

1.5.8. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan terdapat didalam pasal 338 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal 78

3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (Dolus) menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343.
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338.

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat

- (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338).
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula akibat dari unsur perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (378).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang diteliti¹⁴.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Amirrudin, Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2004 hal 31

Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, maka penulis hanya menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

“Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi) “¹⁵

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
2. KUHP Militer.
3. UU RI NO 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer”.¹⁶, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang di ungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

¹⁵ Ibid, hal 31

¹⁶ Ibid, hal 32

1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder”.¹⁷, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, buku.

1.6.3. Pengumpulan Bahan atau Data

Merupakan prosedur yang dilakukan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan guna mengungkap atau menjangring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pustaka dari sumber utama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, koran, serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang terkait dalam materi atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Selanjutnya dari masalah tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan dan saran-saran.

¹⁷ Ibid, hal 32

1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif.

Metode deduktif adalah pola berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan hukum secara khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehingga analisis tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut. Dimana dalam sistematika penulisan tersebut terdiri dari empat Bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dimulai dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

Bab kedua, bab ini mengulas dari rumusan masalah pertama yang menguraikan tentang bagaimana proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Dimulai dari pelaporan, penyidikan, pemeriksaan para saksi, penangkapan dan penahanan sampai proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi

Bab ketiga, bab ini mengurai tentang putusan dan pertimbangan seorang hakim militer dalam menerapkan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan

Bab keempat, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang menyimpulkan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi tersebut, dan juga berisi rekomendasi yang telah dipaparkan dalam bentuk saran.